

**EVALUASI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI DI KOTA PAYAKUMBUH**



OLEH:

RIKA RAHMANITA MANDA
06096056

TUGAS AKHIR

*Dajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Sains Terapan*

**JURUSAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**





No. Alumni Univesitas

Rika Rahmanita Manda

No. Alumni Fakultas

a). Tempat / Tgl. Lahir : Padang / 24 Februari 1986 b). Nama Orang Tua: Ediwarnan dan Zismiarti Azis c). Jurusan : Akuntansi d). Program Studi : Akuntansi Pemerintahan e). NIM : 06096056 f). Tgl Lulus : 24 Juli 2009 g). Predikat Lulus : sangat memuaskan h). IPK : 3.21 i). Lama studi: 32 bulan k). Alamat orang tua: Jln. Semarang No 19 A Asratek Ulak Karang Padang

Evaluasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kota Payakumbuh
 Tugas Akhir DIV oleh Rika Rahmanita Manda. Pembimbing: 1). Zahara, SE,M,Ak ,Ak, 2). Wiwik Andriani, SE, Ak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan SMA dan SMK Negeri di kota Payakumbuh. Populasi penelitian ini adalah semua SMA dan SMK Negeri di kota Payakumbuh yaitu sebanyak 6 Sekolah Menengah Negeri di kota Payakumbuh. Pengambilan sampel dilakukan secara *non-probabilitas* dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria berdasarkan pertimbangan (*judgment*) dengan sampel penelitian sebanyak 4 sekolah yaitu, SMAN 2, SMAN 3, SMKN 1, dan SMKN 2 Payakumbuh. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan kuisioner dengan responden kepala sekolah, bendahara, guru, komite sekolah, dan siswa/OSIS dengan kuisioner yang akan disebarikan sebanyak 20 kuisioner/sekolah. Aspek yang diuraikan dalam penelitian ini adalah pengukuran akuntabilitas, pengukuran transparansi, peran sekolah dan komite sekolah, penyajian penggunaan informasi dalam laporan RAPBS serta sarana dan proses pembukuan penyusunan RAPBS. Berdasarkan hasil evaluasi secara keseluruhan untuk setiap aspek yang diukur, nilai rata-rata pada SMAN 2 adalah 2.79, SMAN 3 adalah 3.37, SMKN 1 adalah 3.22 dan SMKN 2 adalah 3.01. Nilai rata-rata ke empat sekolah tersebut adalah 3.10. Nilai rata-rata tersebut termasuk ke dalam kriteria akuntabel dan transparan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Payakumbuh termasuk ke dalam kriteria akuntabel dan transparan.

Tugas Akhir telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal: 24 Juli 2009

Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji:

Tanda Tangan	1.	2.	3.	4.
Nama Terang	Sukartini, SE,M,Kom,Ak	Amy Fontaneña, SE,Ak	Desi Handayani, SE, Ak	Zahara, SE, M, Ak, Ak

Mengetahui:

Ketua Jurusan

Nurul Fauzi, SE, MM, Ak
 Nama



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat nomor mendaftarkan:

Nomor alumni Fakultas:	Nama	Tanda Tangan
Nomor alumni Universitas:	Nama	Tanda Tangan

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berfungsi sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal. Kualitas sumber daya manusia suatu negara sangat berkaitan dengan kualitas sistem pendidikan yang ada pada negara tersebut. Karena jika mutu sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan sudah baik, tentu diharapkan akan menghasilkan lulusan (*output*) yang baik dan bermutu, dimana mereka akan menjadi sumber daya manusia yang akan bergabung dan tersebar dalam berbagai industri yang menggerakkan pembangunan suatu negara. Sehingga perkembangan dan kemajuan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya. Maka salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dapat dilakukan melalui perbaikan dan peningkatan mutu dan sistem pendidikan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan kepercayaan publik dalam bidang pendidikan sangat terkait dengan perlunya menciptakan proses dan manajemen yang menjamin bahwa sumber daya publik digunakan sebagaimana mestinya. Proses dan manajemen tersebut memerlukan pengelolaan yang baik (*good governance*). Dengan terciptanya *good governance*, diharapkan terwujud efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen tata kelola yang baik (*good governance*). Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua komponen yang saling

mendukung dan melengkapi. Akuntabilitas pelayanan publik dimaksudkan sebagai kemampuan para pejabat publik memberikan penjelasan atas penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya. Transparansi pelayanan publik dimaksudkan sebagai ketersediaan akses bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan publik tersebut.

Dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan [PSAP] Nomor 1 paragraf 22-23) menempatkan akuntabilitas sebagai tujuan utama pelaporan keuangan organisasi pemerintah. Ini karena penyelenggara pelayanan serta pengendalian atas penggunaan sumberdaya keuangan merupakan aspek terpenting yang harus dapat dipertanggungjawabkan oleh organisasi pemerintah. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka membawa suatu perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi.

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengatur pokok-pokok kewenangan pengelolaan keuangan daerah, perbendaharaan dan pemeriksaan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan *omnibus regulation*, yakni peraturan perundangan yang memuat ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004. Pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 di daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah, yang disusun dengan berpedomankan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 memuat secara terperinci sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, yang meliputi perencanaan dan penganggaran, penatausahaan APBD, serta akuntansi dan pelaporan.

Adanya reformasi di bidang keuangan sebagaimana dijelaskan, membawa perubahan pula dalam pengelolaan keuangan di bidang pendidikan. Khususnya untuk sekolah dasar dan menengah, pengelolaan keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah yang berpedomankan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keterlibatan masyarakat dalam dewan pendidikan dan komite sekolah dalam pengelolaan keuangan sekolah dimaksudkan agar tercipta situasi partisipatif serta mendorong transparansi dan akuntabilitas horizontal. Dewan pendidikan merupakan badan mandiri yang berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan kepala daerah dan DPRD dalam pengelolaan pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Komite sekolah merupakan badan mandiri yang berkedudukan sebagai mitra sejajar sekolah. Dengan struktur yang mandiri dan sejajar tersebut, dewan pendidikan dan komite sekolah merupakan saran untuk memberikan umpan balik sekaligus pengawasan oleh masyarakat sebagai pemangku kepentingan atas penyelenggaraan pendidikan.

Komite sekolah menjadi lembaga formal yang menjadi tempat saluran bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Komite sekolah merupakan badan yang mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, yakni pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengontrol (*controlling agency*) dan mediator antara pemerintah dengan masyarakat.

BAB LIMA

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil evaluasi secara keseluruhan untuk pengukuran akuntabilitas, pengukuran transparansi, peran sekolah dan komite sekolah, penyajian dan penggunaan informasi dalam laporan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah), serta sarana dan proses pembukuan penyusunan RAPBS pada SMAN dan SMKN di Kota Payakumbuh yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk pengukuran Akuntabilitas, SMAN dan SMKN di Payakumbuh sudah akuntabel dalam pengelolaan keuangannya.
2. Pada pengukuran Transparansi pengelolaan keuangan sekolah, SMAN dan SMKN di Payakumbuh sudah transparan.
3. Pihak sekolah dan komite sekolah sudah berperan baik dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah.
4. Penyajian dan Penggunaan Informasi dalam Laporan RAPBS pada SMAN dan SMKN di Payakumbuh sudah tersaji dan digunakan dengan baik, sehingga dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
5. Sarana dan Proses Pembukuan Penyusunan RAPBS termasuk ke dalam kriteria akuntabel dan transparan.

5.3 Saran-saran

Beberapa hal yang akan disarankan sehubungan dengan keterbatasan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk penelitian yang lebih sempurna, sebaiknya penelitian dilakukan di semua Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Payakumbuh dengan sampel yang lebih besar.
2. Agar penelitian berikutnya lebih baik, disarankan peneliti menambahkan item pertanyaan yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan sekolah.
3. Dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang ada di Kota Payakumbuh telah Akuntabel dan Transparan seharusnya dapat dipertahankan oleh pihak sekolah untuk pelaksanaan pendidikan yang lebih baik.
4. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah, sebaiknya pihak sekolah lebih terbuka terhadap *stake holder* (Komite Sekolah, orang tua siswa dan siswa) dan menyediakan sarana dan prasarana yang lebih baik.

Daftar Referensi

- Amalia, Eka Rezeki. (2008). "*Pengelolaan Manajemen Keuangan Sekolah di SDN 1 Mulyoagung dan MAN 1 Malang*". Tugas Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Departemen Pendidikan Nasional. "Pedoman Pelaksanaan Block Grant Sekolah Menengah Atas", (2008).
- Halim, A. (2002). "*Akuntansi dan Pengendalian, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*". Editor Abdul Halim. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Harjono, Y (2007), "*Kepsek Bukan Lagi 'Penguasa' Tunggal*". www.kompas.com, 2 Oktober 2007
- Jackson, P.M. (1982). "*The Political Economy of Bureaucrazy*". Oxford : Philip Allan Publishers Limited.
- Komisi Standar Akuntansi Pemerintahan. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Salemba Empat.
- Lipham, James M. 1985. *The Principal Concepts, Competencies, and Cases*. New York: Longman Inc.
- Mardiasmo, (2002). "*Akuntansi Sektor Publik*". Yogyakarta : Penerbit Andi
- Mardiasmo, (2003). "*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*". Yogyakarta : Penerbit Andi
- Mulgan, R (1997). "*The Processes of Public Accountability*". Australian Journal of Public Administration 56 (1) pp.25-36.
- NN. (2008) Metode Kuantitatif. Ditelusuri tanggal 26 Juni 2009. <http://www.Skripsi-Tesis.com/>
- Parwita, Diyah Desi. (2008). "*Evaluasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus Pengelolaan Keuangan SMP Negeri di Kabupaten Bayumas*". Karya Akhir Program Studi Magister Akuntansi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Pedoman Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Blockgrant untuk SKB, (2007).
- Purnomo, S.H., (2005). "*Mandulnya Komite Sekolah*". www.suaramerdeka.com, 22 Juli 2005
- Santosa. (2005). "*Partisipasi Pembiayaan dan Efisiensi Penyelenggaraan Pendidikan (Studi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Banyumas*". Thesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.